

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

Nining^{1*}, Budi Setiawati², Ansyari Mone³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This researcher purposed to find out community participation in infrastructure development in Patongloan Village, Baroko District, Enrekang Regency. Thia study used qualitative research. The results of this study showed that community participation in infrastructure development in Patongloan Village, Baroko District, Enrekang Regency in the form of. 1). Mind participation namely: a). the form of involvement of the village community in the decision making of the development planning deliberation (Musrembang) and b). community involvement in the making of the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes); 2). Participation of energy in the form of community service and mutual cooperation; 3). Participation of expertise in the form of skills; 4). Participation of goods in the form of tools and equipment; and 5). The participation of money in the form of fund contributions made by the community in Patongloan Village was still very minimal and there were still many obstacles that occurred in the implementation of these infrastructure development activities.

Keywords: *community participation, infrastructure development*

Abstrak

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dalam bentuk: 1). Partisipasi pikiran yaitu: a). bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dan b). keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); 2). Partisipasi tenaga dalam bentuk kerja bakti dan gotong royong; 3). Partisipasi keahlian dalam bentuk keterampilan; 4). Partisipasi barang dalam bentuk alat dan perkakas; dan 5). Partisipasi uang berupa iuran dana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Patongloan masih sangat minim dan masih banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur

* nining@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peran pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan mencapai hasil pembangunan secara optimal. Keterlibatan masyarakat luas, merupakan salah satu kunci yang

sangat penting dalam keberhasilan pembangunan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah diperlukan. Pembangunan dapat berjalan terus menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda apabila pembangunan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil dari pembangunan belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa adalah penyediaan dan penyaluran dana desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang

aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Patongloan dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Patongloan adalah perbaikan jalan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumahrumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan desa di Patongloan Kepala Desa Patongloan dibantu perangkat dsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur perbaikan jalan menjadi agenda penting yang dibenahi Pemerintah Desa, karena infrastruktur

merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan.

Pembangunan Infrastruktur merupakan proses pembangunan secara fisik sebagai perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera merata di wilayah indonesia, namun demikian pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah diperoleh masyarakat jika penyebabnya masih dengan sifat masyarakat yang apatis terhadap pembangunan. Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang Desa, dengan tegas disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.

Namun kenyataan yang ada pembangunan infrastruktur pedesaan bertolak belakang dengan tujuan Undang-Undang yang diterapkan. Kualitas pelayanan pembangunan dalam sarana dan prasarana tidak dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan pedesaan kini menjadi perhatian utama dalam dimensi studi pembangunan daerah, kesejahteraan daerah sesungguhnya apa yang dirasakan masyarakat di desa, bilamana masyarakat pada tingkat desa belum memperoleh kesejahteraan maka suatu daerah kabupaten dan kota belum dapat dikatakan telah sejahtera. Melalui asas otonomi daerah, konsentrasi pembangunan terarah pada daerah kabupaten dan kota, dimana dalam lingkup kabupaten tersebut terdapat unit pemerintahan kecil yang bersinggungan langsung kepada masyarakat di pedesaan yaitu pemerintahan desa.

Proses demokratis di Indonesia diharapkan mampu mengikutsertakan dan memaksimalkan peran dan fungsi masyarakat dalam kebijakan pembangunan, terlebih yang langsung berkenaan dengan mereka, seperti program-program pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini seperti yang dikutip oleh Todaro (2000:18) menyatakan bahwa pembangunan

bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur melalui pendekatan partisipatif meliputi partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang, partisipasi uang.

Ditinjau dari akhir tahun 2019-2021 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul sebuah wabah covid-19 yang awal mulanya muncul secara lokal di Wuhan, China pada akhir 2019, lalu merembak keseluruhan bagian negara-negara di dunia yang memporak porandakan sendi perekonomian di dunia terkhusus di negara Indonesia ini. Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan terkhusus di Desa Patongloan, virus covid-19 telah membuat aspek-aspek kehidupan melemah terkhusus aspek pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yang mengakibatkan program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya tidak berjalan

akibat adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19 itu sendiri.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan seringkali tidak tepat sasaran sehingga pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif jauh dari ketetapan yang diharapkan. Masyarakat dijadikan sebagai objek dari proses pembangunan sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur yang berada dilingkungan sekitar. Karena pemerintah sampai saat ini tidak melibatkan semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan infrastruktur.

Observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa yang terjadi di Desa Patongloan dimana program pembangunan infrastruktur yang bersifat partisipatif tidak berjalan sesuai dengan keadaan dilapangan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan tersebut sangatlah kurang maka dari itu masyarakat harus dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran. Peran masyarakat

dalam pembangunan saat ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan tersebut.

Strategi pemerintah desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat kurang terjalin sehingga masyarakat tidak punya wadah untuk menyalurkan aspirasi secara langsung yang mengakibatkan masyarakat kurang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi salah satu kendala mengapa masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam kegiatan pembanguana yang dilakukan sehingga masyarakat lebih memilih terfokus pada kesibukan masing-masing.

Administrasi pembangunan belum diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Saat ini perkembangan menuju kearah itu terlihat sebagai usaha para ahli dan penulis. Administrasi pembangunan berkembang berdasarkan disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu administrasi negara. Siagian (2009:5) mendefenisikan adminitrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan

negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam Afifudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Pembangunan adalah perubahan secara berkelanjutan atau secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan desa berpijak kepada pembangunan masyarakat yang diharapkan mampu memacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri (Orocomna, 2004).

Menurut Adisasmitha (Rahman, 2016), pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dari masyarakat pada keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Menurut Todaro (Maripah, 2017), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut

harus melampaui sisi materi dari keuangan dari kehidupan manusia. Menurut Ginandjar Kartasasmitha (Hayati, 2017), menyatakan bahwa pembangunan prasarana satu diantara upaya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan pada perekonomian.

Pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi dan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Nain, 2019). Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat (Pengemanan, 2017).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan peristiwa yang benar-benar terjadi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Oleh sebab itu pendekatan kualitatif ini yaitu dengan menggabungkan dan mencocokkan antara peristiwa yang terjadi dengan teori yang berlaku. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian

fenomenologi yang dimaksud untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah-masalah yang akan diteliti baik berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada obyek penelitian selama penelitian berlangsung.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi lapangan merupakan pengawasan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian, observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hasil observasi. Wawancara yaitu memperoleh makna yang rasional dengan melakukan percakapan secara berhadapan langsung (*face to face*) dengan informan kegiatan ini dilakukan secara santai namun sistematis, dimana informan dapat mengeluarkan ide, pandangan dan perasaan secara natural. Dokumentasi merupakan bukti yang mendukung penelitian dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-

pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dari awal sehingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat diolah secara sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan keadaan dan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subjek peneliti maupun informasi peneliti untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tahap dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mereduksi data, yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan merekam semua data yang diperoleh kemudian memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan suatu gambaran lebih jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

Setelah data dirangkum peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, dengan hubungan, antara kategori dan jenisnya, sehingga peneliti akan mudah menjelaskan mengenai hasil yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

Langkah ke tiga dari analisis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang mutlak bagi tercapainya suatu pembangunan. Karena partisipasi masyarakat tersebut adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu proses pembangunan yang ada dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan tersebut dapat dirasakan dengan adil dan sejahtera.

Oleh karena itu kesadaran masyarakat merupakan suatu keberhasilan dari pembangunan tersebut, karena adanya pencapaian target program pembangunan yang perlu ditunjukkan pada kebijakan pemerintah. Sehingga sehubungan dengan ini hasil penelitian dapat dikaitkan bahwa pembangunan partisipatif juga dapat ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Partisipasi Pikiran (*Physicological Participation*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa ini belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro.1998:51) diketahui bahwa dalam pelaksanaan perumusan masalah dan pengambilan keputusan tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan seperti rapat Musrembang dan proses RPJMDes, jika masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut maka masyarakat akan lebih berpartisipasi karena masyarakat merasa mengetahui bentuk rencana jenis pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dan beberapa banyak anggaran serta jenis anggaran apa yang digunakan seperti ADD, ADDS, ataupun APBD dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga masyarakat ikut memikul beban dan tanggung jawab bersama. Agar pembangunan ini dapat dirasakan secara merata dan keadilan oleh masyarakat.

Partisipasi Tenaga (*Physical Participation*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa ini belum senada dengan teori

dari Keith Davis (Sastropetro, (1998:51) dimana partisipasi masyarakat di Desa Patongloan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur masi sangat minim, ditinjau dari banyaknya masyarakat yang tidak hadir untuk ikut berpartisipasi pada saat kegiatan seperti gotong royong dan kerja bakti, ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat untuk mengarahkan dalam memberikan kontribusi dalam bentuk fisik sehingga masyarakat akan terfokus kepada kesibukan pekerjaan masing-masing.

Partisipasi Keahlian (*Participation with Skill*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa barang senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro, 1998:51) dimana kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam memberikan keterampilan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap pembangunan walaupun masyarakat Desa Patongloan cukup banyak yang

memiliki keterampilan di bidang infrastruktur seperti tukang bangunan. Sehingga masyarakat menyerahkan kepada pihak pemerintah sepenuhnya untuk menyelesaikan kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi Barang (*Material Participation*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa barang senada dengan teori Keith Davis (Sastropetro, 1998:51) masyarakat antusias ikut serta terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan yaitu meminjamkan alat-alat kerja manual namun lebih kepada alat yang kurang berkualitas. Dengan begitu alat yang dipinjamkan tersebut kurang memiliki nilai manfaat untuk dipergunakan oleh pekerja lapangan.

Partisipasi Uang (*Money Participation*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berupa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang ini belum senada dengan teori Keith Davis (Sastropetro, 1998:51) dimana partisipasi masyarakat sangat minim atau bahkan tidak ada karena

rendahnya tingkat pendapatan ekonomi dari masyarakat Desa Patongloan untuk bisa berpartisipasi dalam bentuk uang, sehingga masyarakat lebih memilih memberikan kontribusi dalam bentuk makanan ringan bataupun hanya sekedar minuman.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan yaitu: Partisipasi pikiran, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi pikiran dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami dalam proses pengambilan keputusan baik itu bentuk gagasan dari tokoh masyarakat deesa maupun proses Musrembang ataupun RPJMDes yaitu: Dapat diketahui bahwa masyarakat yang mewakili belum mampu menyampaikan aspirasinya atau seringkali terjebak dalam proses perencanaan bukan berdasarkan tingkat prioritas dari masyarakat itu sendiri sehingga pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa, dalam pengidentifikasian masalah atau perumusan masalah dalam proses Musrembang dan RPJMDes masyarakat yang seharusnya diundang tidak diundang karena adanya kebijakan dari pemerintah desa sehingga masyarakat

tidak punya wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Partisipasi tenaga, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi tenaga dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu minimnya keterlibatan mayarakat untuk ikut serta dalam memberikan bantuan secara fisik berupa gotong royong dan kerja bakti pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antar pemerintah deengan masyarakat. Partisipasi keahlian, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi keahlian dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu kurangnya pemahaman sehingga mengakibatkan masyarakat lebih terfokus kepada kesibukan masing-masing, Partisipasi Barang, berdasarkan pembahasan diatas mengenai partisipasi barang dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu masyarakat memberikan peralatan yang kurang layak atau kurang berkualitas pakai untuk dipinjamkan kepada pekerja disebabkan karena masyarakat tidak memiliki banyak materi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Partisipasi uang, berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai partisipasi uang dapat diketahui hambatan yang dialami masyarakat dimana tidak secara

langsung dapat ikut berpartisipasi dalam bentuk uang secara tunai namun dilakukan dengan cara memberikan makanan kepada pekerja disebabkan karena redahnya tingkat pendapatan yang mayoritas masyarakat desa hanyalah petani.

Dari beberapa hambatan di atas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan: Partisipasi pikiran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa mengatasi hambatan dalam memberikan kontribusi berupa pikiran dimana masyarakat memberikan aspirasi yang bersumber dari tokoh masyarakat ataupun yang mewakili dalam pengambilan keputusan harus mampu memprioritaskan skala kebutuhan dari masyarakat desa Patongloan daripada keinginan saja, dan pemerintah desa seperti kepala dusun sebagai pemerksaan yang dekat dengan masyarakat harus mampu membangun komunikasi yang baik antar masyarakat agar aspirasi yang diberikan masyarakat yang tidak ikut dalam pelaksanaan musyawarah dapat tersampaikan secara langsung sehingga pembangunan infrastruktur yang menjadi kepentingan individu menjadi kepentingan umum.

Partisipasi tenaga, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam memberikan tenaga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah desa dapat melakukan sosialisai untuk mengajak, mengarahkan serta melakukan komunikasi yang baik akan pentingnya keikutsertaan masyarakat untuk ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat merasa sadar dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Partisipasi keahlian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam hambatan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi keahlian yaitu pemerintah desa dapat menunjuk masyarakat sebagai tenaga ahli agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam partisipasi keahlian. Partisipasi barang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi dalam bentuk barang di Desa Patongloan dengan memberikan perintah kepada masyarakat untuk memberikan alat atau perkakas manual yang bisa dipakai dengan layak yang menunjang pembangunan karena

nantinya juga dapat bertimbal balik kepada masyarakat. Partisipasi uang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan masyarakat dalam partisipasi memberikan kontribusi berupa uang di Desa Patongloan untuk menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan bisa dalam bentuk makanan atau minuman karena dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan masyarakat maka masyarakat bisa memberikan kontribusi berupa makanan atau dalam bentuk terprosedur dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari beberapa hambatan terhadap pembangunan infrastruktur di atas seharusnya pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat yaitu: Transparansi (keterbukaan), pemerintah harus transparansi terhadap program pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat mengetahui informasi terhadap program pembangunan baik itu anggaran pengelolaan pembangunan ataupun anggaran belanja dana desa melalui papan informasi. Partisipasi, keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pembangunan dimana

masyarakat dijadikan subjek bukan hanya sekedar objek dari kebijakan program pembangunan tersebut. Dapat dinikmati, program pembangunan yang partisipatif merupakan program yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena pembangunan tersebut adalah program yang ditujukan kepada masyarakat sehingga program pembangunan ini dapat dirasakan secara keseluruhan, berkeadilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), program pembangunan adalah kegiatan antar pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus mampu bekerjasama dengan masyarakat sehingga program pembangunan infrastruktur ini dapat dipertanggung jawabkan, baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat yang ikut terlibat. Berkelanjutan (*sustainable*), program pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan. Dimana program ini masyarakat terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi dari pembangunan sehingga pembangunan infrastruktur dapat dirasakan dan dijaga.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal mutlak tercapai suatu pembangunan.

Karena partisipasi masyarakat tersebut adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu proses pembangunan yang ada dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan tersebut dapat dirasakan dengan adil dan sejahtera.

Pemerintah harus mampu menerapkan strategi kebijakan atau upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 pasal 78 tentang Tujuan Pembangunan Pedesaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan pokok, sarana dan prasarana, sumber daya dan potensi masyarakat secara berkelanjutan. Serta disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan.

KESIMPULAN

Partisipasi pikiran (*psychological participation*), masyarakat di Desa Patongloan masih sangat minim dalam proses Musrembang dan RPJMDes sehingga masyarakat belum mampu menyampaikan aspirasi dengan baik.

Partisipasi Tenaga (*physical participation*), partisipasi di desa Patongloan masih sangat minim dalam memberikan kontribusi berupa tenaga dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti karena kurangnya komunikasi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat setempat.

Partisipasi Keahlian (*participation with skill*), masyarakat di Desa Patongloan cenderung bersifat apatis karena kurangnya pemahaman dan kesadaran sehingga masyarakat hanya terfokus kepada kesibukan masing-masing.

Partisipasi Barang (*Material participation*), masyarakat di desa Patongloan sudah ikut berpartisipasi dengan meminjamkan alat atau perkakas namun kualitasnya kurang baik.

Partisipasi Uang (*Money participation*), masyarakat di Desa Patongloan belum mampu berpartisipasi secara langsung dalam bentuk uang secara tunai namun masyarakat bisa memberikan makanan seadanya kepada pekerja dalam proses pembangunan infrastruktur yang berlangsung.

REFERENSI

Hadi, A. P. (2015). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan. *Pusat*

- Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987*, pp. 1–14.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan, 15*(1), pp. 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Hayati, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara, 5*, pp. 5375–5388. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL\(02-13-17-04-19-07\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL(02-13-17-04-19-07).pdf)
- Kawulur, I., Lopian, M. T., & Kaawoan, J. E. (2007). Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif, 1*(1), pp. 1–14.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, E. (2015). Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15*(2), pp. 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kurniyati, Y. (2019). *Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intang, Lampung). Diperoleh dari <http://repository.radenintan.ac.id/7939/1/SKRIPSI.pdf>
- Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT, 5*(1), pp. 1–15.
- <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>